



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725, 7054414 Facs. (0751) 7059511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 521. 4 / 558 / PPMHA - 2019

TENTANG
KEGIATAN SUPERVISI, BIMTEK DAN PEMBINAAN DALAM RANGKA
PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN
NAGARI, HUTAN TANAMAN RAKYAT DAN HUTAN RAKYAT KEMITRAAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

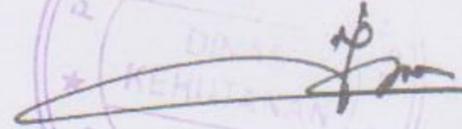
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui Pembangunan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan (HKM/HN/HTR/HRK) Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilaksanakan Kegiatan Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan;
- b. bahwa penyelenggaraan Kegiatan Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan Tahun 2019 pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus memenuhi kriteria tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 11 Februari 2019

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si

NIP. 19690406 199701 1 002

Tebusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dishut Prov. Sumbar di Padang.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Arsip.

PETUNJUK PELAKSANAAN

KEGIATAN SUPERVISI, BIMTEK DAN PEMBINAAN DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN HKm, HN DAN HTR TAHUN 2019



Disusun Oleh :

**BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
HUTAN ADAT DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

PADANG, JANUARI 2019

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-NYA maka *Petunjuk Pelaksanaan Supervisi, BinteK dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR Tahun 2019* ini dapat diselesaikan. *Petunjuk Pelaksanaan* ini dimaksudkan untuk membuat acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Supervisi, BinteK dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR di Provinsi Sumatera Barat yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan Supervisi, Monitoring dan pengendalian HKm,HN,HTR dan HR Kemitraan serta fasilitasi perizinan/Bimtek HPHN/IUPHKm/IUPHTR..

Pembangunan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan adalah salah satu kebijakan revitalisasi sektor kehutanan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pemberian akses ke Lembaga Pembiayaan Pembangunan Hutan dan akses ke pemasaran hasil hutan (industri). Kelompok sasaran pembangunan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan ini adalah masyarakat sekitar hutan produksi dan hutan lindung yang dalam aktifitas ekonominya bergantung pada hutan dan hasil hutan.

Akhir kata, petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Padang, Februari 2019

KEPALA BIDANG
Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat
Dan Hutan Adat



YONEFIS, SH, MM

NIP. 19621102 198503 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	:	DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Unit Eselon III/IV	:	BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT
Program	:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Hasil (Outcome)	:	Luas izin pengelolaan hutan oleh kelompok/masyarakat
Kegiatan	:	Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR
Indikator K. Keg	:	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.
Keluaran (output)	:	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Supervisi, Monitoring dan Pengendalian HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan.- Jumlah Fasilitasi perizinan/Bimtek HPHN/IUPHKm/IUPHTR oleh Pokja PPS- Jumlah Percepatan realisasi perizinan
Volume	:	50.000 ha

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;

IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja Komponen Supervisi, Bintek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 79.060.000,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

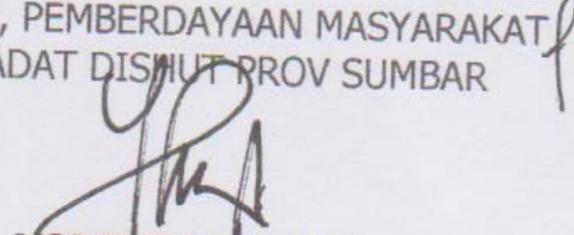
Tabel 2. Rincian biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Supervisi, Bintek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR

Sub Komponen	Uraian	Anggaran
Belanja bahan pakai habis	- ATK	1.760.000
	- BBM	2.772.000
Belanja cetak dan penggandaan	- penggandaan	634.000
Belanja makan dan minum kegiatan	- Belanja makan dan minum pertemuan dengan Keltan/Nagari/KPH dalam rangka Fasilitasi dan Bimtek HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	1.380.000
Belanja perjadin	- Belanja perjadin dalam daerah	64.750.000
	- Belanja perjadin luar daerah	7.764.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Supervisi, Bintek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR ini dibuat agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan .

Padang, Februari 2019

KEPALA BIDANG
PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN HUTAN ADAT DISIUT PROV SUMBAR


YONEFIS, SH, MM

NIP. 19631102 198503 1 005



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725, 7054414 Facs. (0751) 7059511

Nomor : 08/und /PPMHA -2019
Lamp. :
Perihal : Undangan Persiapan Kegiatan

Padang, 4 Februari 2018

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Staf Bidang Penyuluhan
Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat
di-

Tempat

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan Tahun Anggaran 2019, bersama ini kami harapkan kehadiran Bapak/ibu pada:

Hari/Tanggal : Rabu/6 Februari 2019

Waktu : 09.00 Wib sampai selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala Bidang PPMHA

Acara : Rapat Persiapan Kegiatan Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan Tahun Anggaran 2019

Demikian undangan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

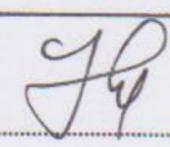
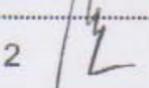
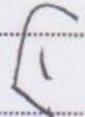
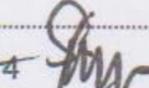
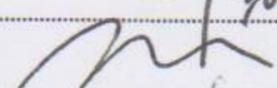
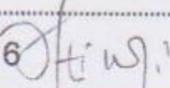
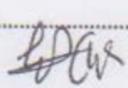
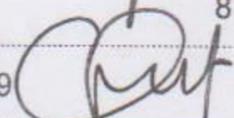
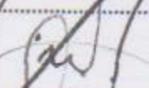
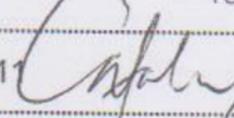
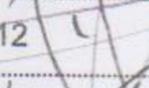
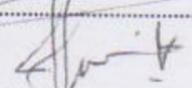
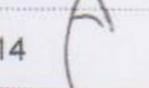
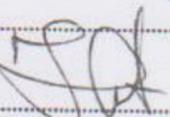
KEPALA BIDANG PPMHA

YONEFIS, SH, MM

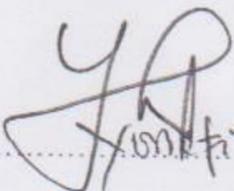
NIP. 19621102 198503 1 005

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Rabu / 6 Februari 2019
 WAKTU : 09⁰⁰ WIB s/d 12⁰⁰ WIB
 TEMPAT : Ruang Rapat Kepala Bidang PPMH
 ACARA : Rapat Persiapan Supervisi, Bimtek dan Pembinaan, Penyiapan, Pengembangan Hum,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	YONEFIS	Kabid	1 
2	IKHARIP	Staf Kepeg	2 
3	Lismai Anita	Staf pany	3 
4	Sayonisa	Staf Hum	4 
5	Hardri Rizaldi	Staf PM	5 
6	Ashningih	Staf PM	6 
7	Mahmuddin	Staf PM.	7 
8	Evi Rosita	Staf PM	8 
9	Romi Samyana	Staf pengukur.	9 
10	ESMON	Staf HAK	10 
11	Ardhan Yulian	Staf HAK	11 
12	Ridha Santia	Staf pengukur	12 
13	Mari Yanti	Staf Pengukuran	13 
14	TIO TRIO PUTRA	Staf HAK	14 
15	Harmizon	Staf PM	15 
16	Kusworo	Kon PM	16 
17			17

Pemimpin Rapat,


 YONEFIS SH, MM